

DAFTAR PUSTAKA

BadanPusatStatistik. 2018. *Keuangan Daerah Kota Padang 2001-2018*. Padang.

BadanPusatStatistik. 2018. *Padang DalamAngka 2001-2018*. Padang.

BadanPusatStatistik. 2018. *Sumatera Barat DalamAngka2018*. Sumatera Barat.

Elita, Zulfa. Muhammad, Said. Nasir, Muhammad. (2014). “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiahkuala Vol. 2 No. 1*. Aceh.

Fikri, A.R. (2017). “Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Galvani, Sise. (2016). “Studi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam”. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Gujarati, D.N. 1978. *EkonometrikaDasar*. New York: McGraw-Hill.

Gujarati, D.N. 2006. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.

Halim, Abdul. 2004. *AkuntansiKeuangan Daerah*. Jakarta: SalembaEmpat.

Jhingan. 2013. *Ekonomi Pembangunan danPerencanaan*. Jakarta: Rajawali.

Mardiasmo. (2009). “Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi : 2005-2008
“ Era Baru Kebijakan Fiskal : *Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*,
Jakarta: Kompas.

Maryati, Ulfi dan Endrawati. (2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan

Ekonomi: Studi kasus Sumatera Barat”, *jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 5 No. 2. Politeknik Negeri Padang.

Rahmah, A.R. dan Zein, Basri. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) universitas Syiahkuala Vol. 1 No.1 Hal 213-220*. Aceh.

Republik Indonesia. Undang-undang No 22 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No 25 tahun tentang Perimbangan Keuangan Anatra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Saleh. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Siagian, Erlinda. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Suandi, Irmal. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makasar.

Sukirno, Sadono. 2002. *Makro Ekonomi Modern :Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 2*. Alih Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Wahyuni. 2013. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi swasta dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”. Universitas Hasanuddin.

Wijanarko, Denny. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

